

PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK INSTITUSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN SURAKARTA

Intan Riyani Fatimah^{*1}, Linda Dwi Puspita Sari², Nadiya Nur Rahma Fatikha³

^{1,2,3} Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

*e-mail: lindadwipuspitasari618@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan pada institusi dinas pemadam kebakaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. Fokus utama kegiatan pengabdian adalah untuk mengetahui sejauh mana laporan keuangan yang disusun oleh dinas pemadam kebakaran telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, serta bagaimana informasi keuangan tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan operasional dan perencanaan anggaran.

Metode yang digunakan dalam Kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara dengan pihak terkait. Hasil Kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa struktur pelaporan keuangan telah mengacu pada regulasi yang berlaku, dan Dinas BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) berperan sebagai motor penggerak utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk dalam sektor publik pemadam kebakaran. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan aset pemerintah daerah, Dinas BPKAD memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk operasional pemadam kebakaran digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pelaporan, serta pengawasan yang lebih ketat agar proses pelaporan keuangan berjalan lebih efektif dan efisien. Kesimpulan dari Kegiatan pengabdian ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung kinerja dan pelayanan publik yang prima di lingkungan dinas pemadam kebakaran. Abstrak ini memberikan gambaran menyeluruh kepada pembaca mengenai latar belakang, metode, hasil, dan kontribusi dari Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan.

Kata kunci: Laporan keuangan, Dinas Pemadam Kebakaran, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Abstract

This study aims to analyze financial reports at the fire department institution as part of an effort to improve transparency and accountability in public sector financial management. The main focus of the study is to determine the extent to which the financial reports prepared by the fire department are in accordance with applicable government accounting standards, and how the financial information is used in operational decision making and budget planning.

The method used in this study is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through documentation studies, interviews with related parties. The results of the study indicate that the financial reporting structure has referred to applicable regulations, and the BPKAD Service (Regional Financial and Asset Management Agency) plays a role as the main driving force in managing regional finances and assets, including in the fire department public sector. As an institution responsible for managing the budget and assets of the regional government, the BPKAD Service ensures that funds allocated for fire department operations are used efficiently, transparently, and in accordance with applicable regulations.

These findings indicate that there is a need for increased human resource capacity, strengthening of the reporting system, and stricter supervision so that the financial reporting process runs more effectively and efficiently. The conclusion of this study emphasizes the importance of accurate, transparent, and accountable financial management to support excellent performance and public service in the fire department environment. This abstract provides readers with a comprehensive overview of the background, methods, results, and contributions of the research that has been conducted.

Keywords: Financial Report, Fire Department, Transparency, Accountability, Public Sector Financial Management

1. PENDAHULUAN

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Surakarta yang beralamat Jl. Tentara Pelajar No.5, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 merupakan instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemadaman kebakaran, serta menyelamatkan masyarakat dari berbagai bahaya kebakaran di wilayah Kota Surakarta.

Akuntansi sektor publik di Institusi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan keuangan, karena berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penerapan akuntansi sektor publik di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta berdasarkan Perda Surakarta No. 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, serta juga berdasarkan Peraturan Walikota No. 136 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah 2025. Pengelolaan keuangan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta menggunakan sistem keuangan SIPD.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam memperoleh informasi pada Kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh proses dan dinamika yang terjadi dalam pelaporan keuangan serta pelaksanaan kegiatan Analisis Standar Belanja (ASB) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang juga dilakukan dengan salah satu staf bagian keuangan di institusi tersebut, yaitu Bapak Agus, yang memiliki pengetahuan langsung mengenai penyusunan laporan keuangan serta implementasi ASB di Damkar Kota Surakarta. Melalui wawancara ini, diperoleh informasi mengenai prosedur, kendala, serta strategi yang diterapkan dalam rangka memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan belanja operasional Damkar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi sektor publik memegang peranan yang sangat penting dalam institusi pemadam kebakaran, karena secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan aset yang digunakan untuk mendukung operasional dan kesiapsiagaan lembaga tersebut. Dalam Kegiatan pengabdian ini, ditemukan bahwa pemadam kebakaran sebagai bagian dari sektor publik sangat bergantung pada sistem akuntansi yang transparan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dari pemerintah daerah dapat digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntansi sektor publik dalam institusi pemadam kebakaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan dengan tepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penguatan sistem akuntansi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini akan sangat mendukung terciptanya pelayanan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel dalam sektor pemadam kebakaran.

Dalam pelaporan akuntansi di institusi pemadam kebakaran, sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi dasar hukum yang mengatur tata cara pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Perda Surakarta No. 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025. Perda ini bertujuan untuk menetapkan APBD Kota Surakarta untuk tahun anggaran 2025, yang merupakan dokumen

perencanaan keuangan tahunan yang disepakati antara Pemerintah Kota Surakarta dan DPRD Kota Surakarta

2. Peraturan Walikota No. 136 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah 2025.

Alur pelaporan akuntansi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pihak-pihak yang terlibat antara lain pengguna anggaran, pejabat teknis, staf teknis, dan pejabat keuangan. Berikut adalah alur secara umum:

1. Perencanaan Anggaran Proses
dimulai dari penyusunan rencana kebutuhan anggaran tahunan yang biasanya diajukan oleh pengguna anggaran, yaitu Kepala Dinas atau pejabat setingkat.
2. Penganggaran dan Pengesahan
RKA-SKPD disusun dan diajukan kepada BPKAD, kemudian dibahas oleh DPRD dan dimasukkan dalam APBD.
3. Pelaksanaan Anggaran
Dilaksanakan berdasarkan DPA. SPJ diajukan untuk pencairan dana dan diverifikasi oleh petugas keuangan.
4. Pencatatan Transaksi
Dilakukan dalam SIPKD/SIMDA secara akrual. Ini mencakup realisasi, sisa anggaran, dan penggunaan aset.
5. Penyusunan Laporan Keuangan
Mencakup LRA, Neraca, LO, dan LPE. Laporan ini diverifikasi serta diaudit oleh BPK.
6. Evaluasi dan Tindak Lanjut
Diperlukan untuk perbaikan anggaran pada tahun mendatang.

Sistem yang digunakan adalah SIPD serta untuk penanganan kendala yang terjadi adalah BPKAD.

Perencanaan dan pelaksanaan belanja dinas pemadam kebakaran surakarta dilakukan pada saat tahun sebelumnya, perencanaan meliputi jangka 5 tahun serta jangka 1 tahun. Perencanaan tersebut dibuat sebelum memasuki tahun anggaran baru, yaitu perencanaan sudah jadi pada bulan November.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di Kota Surakarta diwujudkan melalui sistem pelaporan dan pengawasan yang ketat.

Pengawasan dilakukan melalui:

- Internal oleh APIP.
- Eksternal oleh BPK setiap tahun, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan memberikan pendapat.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja mereka, baik dari segi administratif maupun keuangan. Ada dua jenis laporan utama yang harus disusun secara berkala, yaitu:

1. Laporan Kegiatan Triwulanan
Laporan ini disusun setiap tiga bulan dan berfungsi sebagai dokumentasi menyeluruh atas semua kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh dinas. Cakupan laporan ini meliputi:
 - Jumlah kejadian kebakaran yang diatasi

- Penanganan non-kebakaran
- Kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat umum
- Pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional
- Monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- Pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penguatan kapasitas pelayanan kebakaran.
- Input dalam Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah (SIKPD) dan SIPD.

Laporan ini juga menjadi dasar untuk menyusun evaluasi kinerja individu maupun tim operasional, karena data yang terekam mencerminkan tingkat responsivitas, efektivitas penanganan kejadian, serta partisipasi dalam kegiatan pencegahan kebakaran. Selain itu, data dari laporan triwulan ini digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berikutnya, khususnya untuk pengusulan anggaran kebutuhan alat, peningkatan kapasitas personil, serta pengembangan sarana pendukung penanggulangan bencana.

2. Laporan Keuangan – Rekonsiliasi dengan BPKAD

Jenis laporan kedua adalah laporan keuangan berkala, yang disusun minimal setiap triwulan, dan bersifat administratif serta akuntabel secara fiskal. Laporan ini wajib direkonsiliasi dengan BPKAD Kota Surakarta, sebagai instansi pengelola keuangan daerah. Tujuan dari rekonsiliasi ini mencakup:

- Menyampaikan realisasi penggunaan anggaran dinas berdasarkan kode rekening kegiatan yang tertera dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- Memastikan kesesuaian dan sinkronisasi data keuangan antara dinas dan BPKAD untuk mencegah adanya selisih atau ketidaksesuaian laporan.
- Menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Mendukung proses audit yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari pengawasan akuntabilitas penggunaan dana APBD.

Penyusunan laporan ini dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai penanggung jawab resmi atas kebenaran dan keabsahan laporan tersebut.

Proses audit pelaporan keuangan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dilakukan secara berlapis dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal. Tujuannya adalah memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tahapan proses audit tersebut:

1. Penutupan Buku Akhir Tahun

Menjelang akhir tahun anggaran, dinas melakukan penutupan buku, yaitu penyelesaian seluruh transaksi keuangan selama satu tahun. Tahap ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan tahunan, sesuai penjabaran anggaran yang tertuang dalam Perwali No. 136/2024, yang terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan selama satu periode pelaporan. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, LRA disusun dengan basis kas, artinya transaksi diakui saat kas diterima atau dibayarkan. Komponen utama LRA meliputi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan).

- Neraca Keuangan menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, neraca disusun dengan basis akuntansi akrual, yaitu transaksi dicatat pada saat terjadi, meskipun kas belum diterima atau dibayar. Komponen utama dalam Neraca
 1. Aset
 2. Kewajiban
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK berisi penjelasan naratif dan rincian atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan, serta informasi tambahan yang relevan untuk pengguna laporan keuangan. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, CaLK merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan wajib disusun oleh entitas pelaporan. Isi CaLK antara lain mencakup informasi umum entitas pelaporan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan atas setiap pos laporan keuangan, informasi tambahan lainnya, seperti komitmen dan kontinjensi.

Penyusunan laporan ini wajib mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010, serta memperhatikan kode rekening dan struktur APBD sebagaimana tercantum dalam Perda No. 11/2024.

2. Rekonsiliasi dan Tinjauan Internal Bersama BPKAD

Setelah penutupan buku, dilakukan rekonsiliasi keuangan antara laporan internal dinas dan data keuangan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Tujuan rekonsiliasi ini adalah untuk:

- Menyesuaikan realisasi anggaran berdasarkan dokumen resmi.
- Mengonfirmasi saldo akhir dan pos belanja.
- Menjamin konsistensi data dengan sistem keuangan pemerintah daerah, terutama SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Dilakukan untuk mencocokkan saldo akhir, kode rekening, dan pos belanja dalam sistem SIPD, memastikan keakuratan dan kesesuaian data fiskal. Proses ini penting untuk menjamin validitas laporan sebelum masuk ke tahap pemeriksaan berikutnya.

3. Tinjauan dan Pendampingan oleh Inspektorat Daerah

Setelah rekonsiliasi selesai, laporan keuangan direview oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada tahap ini, inspektorat melakukan:

- Peninjauan kembali untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen laporan.
- Pendampingan teknis dan pembinaan agar laporan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- Penyusunan Berita Acara Review Laporan Keuangan Daerah (LKD) sebagai dokumen resmi.
- Pemberian rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

Tahap ini merupakan bagian dari pengawasan internal yang harus dilalui sebelum audit eksternal dilaksanakan. Inspektorat melakukan review dan pembinaan teknis, menyusun Berita Acara Review LKD, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ada temuan.

4. Audit Tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tahap akhir dari proses audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin setahun sekali. Audit ini bertujuan untuk:

- Memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Menilai tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan pelaksanaan anggaran.
- Mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan, inefisiensi, dan risiko keuangan.

Hasil audit BPK disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik



Gambar 1. Kantor atau Pos Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.



Gambar 2. Proses wawancara dengan pihak keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta



Gambar 3. Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Dinas pemadam kebakaran atas kinerja baik dalam penyusunan laporan keuangan 2021



Gambar 4. Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Dinas pemadam kebakaran atas kinerja baik dalam penyusunan laporan keuangan 2022



Gambar 5. Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Dinas pemadam kebakaran atas kinerja baik dalam penyusunan laporan keuangan 2023

4. KESIMPULAN

Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Sebagai bagian dari sektor publik, institusi ini bergantung pada sistem akuntansi yang transparan untuk memastikan penggunaan dana APBD sesuai dengan tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Proses akuntansi dimulai dari perencanaan anggaran yang matang, dilanjutkan dengan pengesahan, pelaksanaan, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga

evaluasi kinerja dan tindak lanjut. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemadam Kebakaran berpedoman pada regulasi daerah seperti Perda No. 11 Tahun 2024 dan Perwali No. 136 Tahun 2024 serta menggunakan sistem informasi seperti SIPD dan SIMDA untuk pengelolaan data keuangan secara terintegrasi.

Pelaporan keuangan dilakukan secara berkala dalam bentuk laporan kegiatan triwulanan dan laporan keuangan yang direkonsiliasi dengan BPKAD. Proses ini bertujuan untuk menyampaikan informasi realisasi anggaran, efektivitas penggunaan dana, serta mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan diawasi melalui mekanisme berlapis: audit internal oleh Inspektorat Daerah (APIP) dan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses ini memastikan bahwa seluruh pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat, sah, dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, penguatan sistem akuntansi dan peningkatan kapasitas SDM di bidang ini menjadi kunci penting dalam mendukung pelayanan publik yang profesional, responsif, dan akuntabel dalam sektor kebakaran. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan dapat dipercaya publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan tugas ini yang berjudul "Pelaporan Keuangan Sektor Publik Institusi Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta."

Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada:

- Ibu Dr. Susilaningtyas Budiana Kurniawati, S.E., M.Si., selaku dosen mata kuliah Akuntansi sektor publik II yang telah memberikan tugas dan arahan selama proses pembelajaran. Tugas yang diberikan tidak hanya menjadi bagian dari penilaian akademik, tetapi juga memberikan pengalaman dan wawasan baru yang sangat berarti.
- Bapak Agus, selaku Staf Bagian Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, wawasan, dan penjelasan secara langsung mengenai proses pelaporan keuangan, implementasi Analisis Standar Belanja (ASB), serta dinamika pengelolaan anggaran di lingkungan Damkar Surakarta.
- Pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, yang telah memberikan akses, sambutan hangat, serta data dan dokumentasi yang sangat membantu dalam penyusunan kajian ini.
- Dinas BPKAD Kota Surakarta (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), atas peran pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan dukungannya dalam memastikan akuntabilitas laporan keuangan di sektor publik.
- Rekan satu kelompok atas kerja sama yang solid, semangat, dan dedikasi dalam menyusun dan menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

- RRI. (2021, Juni 2). *Damkar Kota Solo Siap Operasikan Armada Baru*. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/1003126/damkar-kota-solo-siap-operasikan-armada-baru>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2024). *Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*. Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2024). *Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*. Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2024). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*. Diakses dari: <https://solodata.surakarta.go.id/sipd>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.